

ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERIODE TAHUN 2009-2013

Irwansyah¹, Sukma Sushanti², A.A Bagus Surya Wisnu Nugraha³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : irwansan26@gmail.com¹, sukmasushanti@gmail.com², aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

This study attempted to analyze Corporate Social Responsibility PT. Newmont Nusa Tenggara in subdistrict Sumbawa Barat period 2009-2013. This research using two concept, namely: first, the concept of multinational corporation in International Political Economy by Steinbockova explaining cooperation pattern that relation MNCs and Nation-states throug CSR. Second, the Concept of Corporate Social Responsibility by kotler-lee explaining philanthropy responsibility PT. Newmont Nusa Tenggara on human development index in subdistrict Sumbawa Barat. both of concept describe PT. Newmont Nusa Tenggara as MNC can help problem in Sumbawa Barat as new subdistrict in Nusa Tenggara Barat that still need infrastructure and human resources to compete other region. Therefore, there is problem if mine disclosure region to depend on CSR PT. Nusa Tenggara such as job creation and phylantrophy on Sumbawa Barat developing. CSR PT. Nusa Tenggara contributed to improve skill and help to develop local business with Local Business Initiative programme.

Keyword : *Corporate Social Responsibility, Human Development Index Sumbawa Barat, Local Business Initiative.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan isu dalam hubungan internasional telah memberikan peluang keterlibatan bagi aktor non-negara. Semakin banyaknya aktor non negara menjadikan peran negara sebagai aktor tunggal dalam penyelesaian suatu isu menjadi kurang dominan lagi. Satu dari banyaknya aktor non-negara yang mempunyai peran penting dalam ekonomi politik internasional adalah Perusahaan Multinasional (PMN). Jumlah perkembangan PMN menurut data statistik *United Nations Conference On Trade and Development* (UNCTAD) tahun 1993 terdapat 37.000 PMN dan 170.000 cabang di seluruh dunia kemudian angka ini terus

mengalami kenaikan (UNCTAD, 1993:22). Pada tahun 2008 terdapat 82.000 PMN 810.000 cabang yang menghasilkan 15 triliun dolar AS total *Foreign Direct Investment* (FDI), PMN juga mempekerjakan 77 Juta orang dan menguasai sepertiga dari total ekspor barang dan jasa di dunia (Chon, 2012).

Dalam menanggapi kritik atas keberadaan dan aktivitas PMN, Negara dan PMN dan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan sehingga kritik atas keberadaan PMN yang hanya mengeksploitasi kekayaan negara tuan rumah dapat di minimalisir. Salah satu strategi Negara dan PMN untuk

menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan adalah dengan mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Hermawan, 2006:225). CSR digunakan juga oleh PMN untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir dampak FDI yang dilakukan oleh PMN.

Salah satu contoh penerapan konsep CSR di Indonesia adalah CSR yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) adalah Perusahaan Multinasional yang berasal dari Amerika Serikat, NNT beroperasi pada sektor pertambangan mineral (emas, perak, tembaga, dan lain-lain) di kabupaten Sumbawa Barat. PTNNT mempunyai peran besar dalam sektor pendapatan daerah Sumbawa Barat, yaitu sebesar 94% berasal dari sektor pertambangan mineral. Selain berkontribusi pada sektor ekonomi, NNT dengan pemerintah daerah melakukan peran dalam pembangunan masyarakat Sumbawa Barat melalui divisi *Community Development* (Comdev). Comdev mempunyai program CSR yang membantu pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bantuan usaha mikro untuk pembangunan masyarakat di Sumbawa Barat.

Penanganan masalah sosial membutuhkan kerja sama dari berbagai kalangan masyarakat. Peran dari NNT di Sumbawa Barat terlihat dari pembangunan daerah yang pesat. Sumbawa Barat mempunyai indeks pembangunan manusia pada tahun 2004 berada di angka (61,9) urutan ke-5 dari 10 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat bisa dikatakan pada tahun sebelum beroperasinya NNT adalah provinsi dengan indeks pembangunan manusia paling rendah di Indonesia (BPS, 2004).

Kemajuan pembangunan wilayah kabupaten Sumbawa Barat tidak terlepas dari usaha pemerintah dan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan multinasional sering kali dikritik sebagai hanya pencitraan. Namun, jika dilihat dari tindakan oleh PMN Newmont Nusa Tenggara di NTB untuk membangun masyarakat, akan menjadi analisis penelitian tentang peran PMN sebagai aktor non negara yang mempunyai peran dalam pembangunan masyarakat suatu daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Jurnal Rhys Jenkin (2005) "*Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty*" Menyebutkan faktor-faktor dukungan organisasi-organisasi internasional terhadap CSR dan peran PMN dalam mengurangi angka kemiskinan. Upaya untuk mengatur aktivitas PMN agar berkontribusi dalam pembangunan masyarakat telah ada sejak tahun 1970, aturan internasional dirancang untuk mendukung usaha-usaha PMN di negara tempat melakukan aktivitas bisnisnya. Pada tahun 1990 terlihat bahwa inisiatif CSR datang secara luas dari negara maju. negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, *Non Governmental Organization* (NGO), kelompok pemerhati hak asasi manusia dan lingkungan mulai menyuarakan pentingnya kontribusi untuk tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Alan Winters dalam jurnal Jenkins mengidentifikasi 3 jalur yaitu *enterprise channel*, *distribution channel*, dan *government revenue channel* (Jenkins, 2005). CSR dan *enterprise channel* yaitu salah satu cara yang digunakan oleh PMN untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan membuat kesempatan kerja. CSR dan *distribution channel* yaitu perusahaan

mengurangi harga yang dijual oleh perusahaan terhadap masyarakat miskin jika PMN itu beroperasi dalam bidang produksi barang konsumsi atau obat-obatan. Kemudian CSR dan *government revenue* yaitu pendapatan negara dari pajak yang dibayarkan PMN bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyusun program dalam mengurangi kemiskinan.

Pengaruh tulisan Jenkins pada penulisan skripsi ini adalah mekanisme yang digunakan oleh PMN untuk dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat di Sumbawa Barat dipengaruhi oleh adanya PMN dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga pemerintah dapat mengurangi angka pengangguran. Selain dari berkurangnya angka pengangguran, distribusi *channel* yang dilakukan oleh NNT dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar tambang Sumbawa Barat dengan pembelian barang-barang mentah kebutuhan NNT. Kemudian *government revenue* yang diperoleh oleh pemerintah digunakan untuk mengelolah aspek pembangunan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Mekanisme yang dipaparkan Jenkins dapat menggambarkan sejauh mana peran PMN dalam pembangunan masyarakat yang dipusatkan pada tataran dampak positif secara tidak langsung beroperasinya NNT di Sumbawa Barat.

George C. Lodge (2006) "*A Corporate Solution to Global Poverty: How Multinationals Can Help the Poor and Invigorate Their Own Legitimacy*" Menyebutkan bahwa PMN dalam mengurangi kemiskinan dengan cara menghubungkan bisnis lokal dengan pasar dunia dan membawa akses terhadap investasi dan teknologi. PMN sebagai agen pembangunan masyarakat ingin mengubah *image* mereka yang dituduh sebagai penyebab

adanya kemiskinan. PMN menempatkan cabang perusahaan di lokasi yang mempunyai sumber daya mineral yang tinggi seperti negara berkembang. Sehingga, tantangan untuk mengurangi *gap* kemiskinan oleh PMN di negara berkembang menjadi lebih besar.

Lodge menambahkan bahwa isu kemiskinan tidak lagi hanya menjadi perhatian negara namun juga telah menjadi agenda tercantum dalam tanggung jawab perusahaan dalam CSR. Dalam hal ini Lodge menilai bahwa banyak negara yang belum cukup mampu menyelesaikan isu kemiskinan sendirian. Penyebab adanya kemiskinan bisa beragam dan bervariasi. Benar atau salahnya, banyak yang menyalahkan perusahaan sebagai agen globalisasi. PMN terlibat dalam pengurangan angka kemiskinan untuk dua alasan; Pertama, pengurangan kemiskinan tergantung dalam pertumbuhan bisnis PMN. Kedua, pengurangan kemiskinan perlu adanya perubahan yang sistemik dan PMN adalah alat yang paling efisien.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami eksplorasi makna dari suatu individu maupun kelompok sosial. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi tentang perilaku Perusahaan Multi Nasional (PMN) dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap fenomena kontemporer yang pada perilaku Perusahaan Multinasional (PMN) dalam memaknai problematika yang terjadi di masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 OPTIMISME TERHADAP AKTUALISASI PERUSAHAAN MULTINASIONAL (PMN)

Perdebatan aktualisasi PMN di suatu negara banyak muncul di tahun 2000an. Aktualisasi PMN di Indonesia yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menjadi perdebatan atas keberadaannya di Indonesia. PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) adalah perusahaan pertambangan yang mengelola mineral berupa emas, perak dan tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, perusahaan multinasional ini beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-41/MENLH/10/1996 Tentang ANDAL, RKL dan RPL Terpadu Pertambangan Tembaga-Emas di Batu Hijau dan Fasilitas Penunjangnya PT. Newmont Nusa Tenggara tanggal 2 Oktober 1996 dan Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 3126/0115/SJ.T/1997 Tentang ANDAL, RKL dan RPL PLTU, PLTD dan SUTT di Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB tanggal 20 Agustus 1997. PT. Newmont Nusa Tenggara adalah perusahaan pertambangan yang berdasarkan permodalan campuran, Asing (56%) dan Dalam Negeri (44%) (proper.menlh.go.id, 2013).

Adanya komitmen PTNNT untuk menampung angkatan kerja yang ada di Sumbawa Barat, menjadi kesempatan bagi Sumbawa Barat untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Isu sosial seperti ketegakerjaan sering kali menjadi masalah bagi daerah-daerah yang masih belum banyak sektor lapangan kerja yang bisa dilakukan masyarakat. Penerapan CSR PTNNT diharapkan dapat memperbaiki standar hidup masyarakat Sumbawa Barat yang masih banyak memerlukan

bantuan dari segi dana dan keterampilan khusus yang sesuai dengan potensi daerah Sumbawa Barat

Tingginya angka keluarga prasejahtera di Sumbawa Barat, khususnya di desa-desa transmigrasi, disebabkan karena masih terbatasnya fasilitas atau sarana penunjang kegiatan perekonomian. Akses transportasi yang belum memadai, sarana penerangan (listrik) yang belum terhubung dengan jaringan PLN, sarana air bersih yang belum memadai, fasilitas kesehatan dan pendidikan masih jauh dari harapan, serta akses pemasaran hasil pertanian yang terbatas. Kondisi ini disebabkan karena kebijakan “membangun desa, menata kota” dan “pembangunan berbasis Rukun Tetangga” yang direncanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat belum optimal.

Permasalahan tenaga kerja telah direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 yang mengharuskan setiap perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat mempekerjakan minimal 50% warga lokal (Sumbawa Barat). Permasalahan kesenjangan sosial dan masih tingginya angka masyarakat pra sejahtera di Sumbawa barat, telah diupayakan melalui program pengembangan masyarakat, namun masih perlu diarahkan agar lebih efektif, yaitu sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pengembangan masyarakat di Sumbawa Barat perlu melibatkan semua pihak agar terciptanya pembangunan yang diharapkan. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari pengembangan masyarakat suatu daerah adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia meliputi angka pendidikan, angka kesehatan dan angka

harapan hidup. Dalam melihat permasalahan indeks pembangunan manusia di Sumbawa Barat yang masih lemah, pada pengimplementasian CSR PTNNT 2009-2013 diharapkan akan membawa dampak bagi kemajuan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan sumber daya manusia di Sumbawa Barat.

Berkembangnya tulisan-tulisan yang mengkorelasikan antara kekayaan mineral dan pertumbuhan ekonomi mendukung pandangan bahwa pengelolaan sektor pertambangan merupakan peran yang penting di suatu negara untuk proses pembangunan. Dukungan pemerintah dan institusi sangat penting agar distribusi kekayaan yang berasal dari mineral dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Selama pemerintah dapat bertanggung jawab untuk memastikan PMN yang melakukan investasi dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya pandangan bahwa implementasi CSR dapat digunakan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap perkembangan negara (Hamann, 2003). Tumbuhnya tanggapan positif terhadap PMN menjadikan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah wujud nyata yang harus dicapai. Oleh karena itu, PMN mengimplementasikan CSR yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan alat untuk penurunan angka kemiskinan.

Aktualisasi PMN berdampak pada pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang melakukan kegiatan operasinya di Sumbawa Barat, Indonesia. Implementasi CSR PTNNT disinergikan oleh pemerintah untuk mencapai pembangunan daerah. PTNNT melakukan

aktivitas penambangan mineral dengan komoditas produksi paling banyak adalah emas, perak dan tembaga. Hal ini menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah deretan penghasil emas, perak dan tembaga terbesar kedua setelah Papua. Oleh karena itu, Sumbawa Barat sangat bergantung secara ekonomi dengan perusahaan tambang, sektor tambang berperan sekiranya 95% bagi pendapatan daerah Sumbawa Barat. Pendapatan daerah dari sektor tambang digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sumbawa Barat dan pertambangan adalah dua hal yang saling berkaitan, hal ini terjadi karena sektor lain sedikit berdampak bagi pendapatan daerah.

4.2 SINERGI PEMERINTAH SUMBAWA BARAT DAN PTNNT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemerintah selaku pemberi kuasa terhadap segala aktivitas yang ada di daerahnya melakukan sinergi dengan PMN untuk ikut berkontribusi pada pembangunan daerah. Adanya sinergi menimbulkan pola hubungan antara Pemerintah dan PMN, Steinbockova (2007) memaparkan ada lima pola dalam melihat hubungan antara *Nation-states* dengan PMN, yaitu: *Cooperation Patterns*, *Confrontation Patterns*, *Interdependence Patterns*, *Independence Patterns*, dan *The Synthesis Pattern*. Penjelasan mengenai pola hubungan yang paling mendekati antara pemerintah daerah Sumbawa Barat dan PTNNT yang paparkan dalam tulisan ini hanya tiga *pattern* akan dijelaskan sebagai berikut:

A. *Cooperation Patterns*

Dalam hubungan PMN dan *Nation-states* berusaha menjalin kerja sama dengan membangun konsolidasi saling menguntungkan. Termasuk dalam *cooperation patterns* adalah kerjasama bidang ekonomi, sosial dan politik. Pola ini tidak menyebutkan kerja sama yang paling dominan yang dapat terbentuk tetapi lebih melihat arah dalam pembangunan di negara tujuan investasi. Arah pembangunan pemerintah daerah Sumbawa Barat disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia.

Dalam melihat hubungan kerjasama ini, menurut RPJM Indonesia tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama di daerah melibatkan sektor swasta yaitu PMN, pemanfaatan CSR dari PMN seperti dana hibah dan program peningkatan keterampilan melalui lembaga pelatihan yang disediakan akan membuat pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah lebih mudah untuk direalisasikan. Melihat arah kerjasama pemerintah Sumbawa Barat dan PTNNT dalam pemberdayaan masyarakat dapat sama menguntungkan kedua belah pihak.

B. *Interdependence Patterns*

Hubungan antara PTNNT dan pemerintah dalam sektor pendapatan daerah, perubahan kebijakan mengenai pertambangan, dan jaringan bisnis membuat kedua aktor ini saling membutuhkan. Sektor pertambangan menyumbang 168 triliun rupiah atau 95% bagi pendapatan daerah Sumbawa Barat tahun 2009-

2013, ketergantungan pemerintah atas pendapatan daerah sektor pertambangan sangat tinggi mengingat pertambangan menopang pendapatan daerah. Dalam hal ini PTNNT selaku pemberi mamfaat kepada pemerintah mengharapkan kegiatan operasional pertambangan dapat terus berjalan lancar, namun pemerintah ingin mendapatkan mamfaat lebih besar dengan menerapkan kebijakan larangan ekspor barang tambang sejak adanya kisruh divestasi antara pemerintah dan PTNNT.

Hubungan saling membutuhkan antara PTNNT, Pemerintah Indonesia dan masyarakat Sumbawa Barat membuat pelarangan ekspor barang tambang hanya diberlakukan sementara, hal ini dilakukan pemerintah Indonesia melihat perekonomian di Sumbawa Barat yang tergantung akan pertambangan dan sejak berlakukannya pelarangan ekspor tersebut menimbulkan dampak bagi karyawan PTNNT banyak yang dirumahkan dan masyarakat yang menerima bantuan dana CSR dikurangi akibat operasional perusahaan yang tak berjalan lancar. Akibat diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, PTNNT sangat khawatir akan kelangsungan bisnisnya ketika pelarangan ekspor terjadi, pada September 2013, PTNNT pernah menyebutkan *opsi* akan menutup perusahaan tambangnya jika tidak menemukan titik temu persetujuan dengan pemerintah Indonesia. Menghadapi tekanan ini, akhirnya pada akhir Desember 2013, pemerintah Indonesia setuju untuk mengamandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang menghasilkan putusan untuk menurunkan ekspor minimum dan menunda pembangunan smelter sampai batas yang telah ditentukan. Amandemen ini termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang mengijinkan ekspor

bahan tambang lebih dari 15% sebagai hasil dari lobbying yang dilakukan PTNNT.

Berdasarkan *Interdependence Pattern* yang digambarkan diatas, ketergantungan pemerintah Indonesia akan investasi asing sangatlah tinggi, tak heran jika PMN mempunyai daya *bergain* lebih tinggi karena sumber daya modal yang mereka miliki. Ketergantungan Indonesia akan investasi asing terutama pertambangan sangat tinggi, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya modal yang dimiliki dan kemampuan untuk mengambil alih perusahaan asing masih kurang pada saat itu, pemikiran akan keberlangsungan hidup masyarakat setempat perusahaan beroperasi menjadi situasi yang rumit sehingga kebijakan pemerintah sering berbenturan. Oleh karena itu, kemandirian sangat diperlukan untuk menghadapi masalah ketergantungan akan investasi asing ini.

C. Independence Patterns

Dalam hubungan ini, PMN dan negara dihadapkan dengan kemandirian ekonomi dan tidak bergantung satu sama lain. Pemerintah negara tuan rumah harus mempunyai alternatif lain selain mengharapkan pendapatan dari PTNNT, mengantisipasi hal ini pemerintah daerah Sumbawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang CSR yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat. Pengembangan ekonomi lokal yang potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Sekongkang adalah sektor pertanian dan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031. Pasal 32 ayat 2 menyebutkan Kecamatan Sekongkang sebagai bagian dari

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata, sedangkan PTNNT lebih mempunyai banyak pilihan ketika bisnisnya tak lagi berjalan lancar di satu negara, setelah kewajiban divestasi selesai pada tahun 2015, PTNNT memutuskan menjual seluruh sahamnya di pertambangan Batu Hijau Sumbawa Barat, PTNNT memindahkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat di Sumbawa Barat dilakukan oleh pemerintah yang didukung oleh PTNNT. Pada 2008, NNT mempekerjakan 4.150 orang. Dari jumlah tersebut 2.652 karyawan (64 persen) berasal dari provinsi Nusa Tenggara Barat dan 1498 orang berasal dari luar NTB. Jumlah pekerja asing yang berkurang karena proyek telah berkembang dan staf Indonesia menggantikan supervisor dan manager asing. Pada 2009, sekiranya 1,5 persen (64 orang) merupakan pekerja ekspatriat. Penurunan jumlah pekerja asing di lokasi tambang secara keseluruhan menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi para tenaga kerja Indonesia dan juga meningkatkan keterampilan untuk kegiatan pertambangan di Indonesia.

PTNNT melakukan pendekatan yang mirip dengan kebijakan ketenagakerjaan untuk mendapatkan barang dan jasa dari vendor dan kontraktor. Departemen Pembelian dan Kontrak PTNNT mengembangkan program yang disebut *Local Business Initiative* (LBI), LBI menggunakan kategorisasi kontraktor yang sama berdasarkan kedekatan wilayah dengan Proyek. Selain itu, Departemen ini melalui program LBI, bekerja sama dengan kontraktor lokal dengan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan manajemen bisnis dan kewirausahaan,

bimbingan mengenai perpajakan, akses terhadap modal, konstruksi, manajemen sumber daya manusia dan akses ke fasilitas Pusat bisnis yang dibangun PTNNT.

4.3 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PHILANTHROPY

Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha atau korporasi untuk menjaga hubungan dengan *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, LSM, karyawan, dan lain sebagainya). Pergerakan CSR awal tahun 2000 telah menjadi fenomena global, kepentingan dan pertumbuhan CSR banyak dilakukan di negara-negara Eropa. Berdasarkan laporan dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2001), inisiatif korporasi untuk melaksanakan CSR telah menjadi tren dunia bisnis beberapa tahun terakhir. CSR adalah fenomena global yang terjadi dengan bermacam-macam penerapan diberbagai belahan dunia. Beberapa inisiatif perusahaan untuk melaksanakan CSR terjadi secara sukarela karena korporasi mempunyai aturan hukum dan tekanan untuk melaksanakan CSR. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan komitmen dan manajemen praktik dalam pelaksanaan CSR, bahkan dalam beberapa area penerapan seperti standar buruh, lingkungan, hak asasi manusia dan melawan korupsi. Langkah pertama yang dapat diambil adalah meningkatkan pembangunan atas norma sosial atas etika bisnis sehingga CSR dapat berdampak bagi *stakeholder* dan masyarakat tempat korporasi beroperasi. Tujuan utama dilaksanakannya CSR adalah untuk membuat korporasi mengembangkan masyarakat agar hubungan yang harmonis dapat terjalin antara

korporasi dan masyarakat. Hubungan korporasi dan masyarakat menjadi sangat penting karena masyarakat adalah objek yang terdampak langsung akibat adanya aktivitas korporasi.

A. Corporate Philanthropy

corporate philanthropy adalah tanggung jawab perusahaan dalam mendukung kegiatan masyarakat seperti bantuan langsung, pelatihan keterampilan dan penyediaan alat-alat kebutuhan masyarakat (Kotler dan Lee, 2008). Inisiatif CSR yang dilakukan oleh PTNNT berdasarkan tulisan Kotler dan Lee (2008), dapat diidentifikasi sebagai *Corporate Philanthropy*, hal ini berdasarkan arah dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PTNNT lebih menekankan pada bantuan langsung dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat Sumbawa Barat. Bantuan dana langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan tahun 2009-2013 yang dikeluarkan oleh PTNNT berjumlah 221 milyar rupiah untuk bantuan masyarakat kurang mampu. Bantuan ini dikeluarkan melalui donasi langsung dan proyek perbaikan rumah ke desa-desa dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah tertinggal. Kemudian pada sektor kesehatan seperti operasi bibir sumbing yang dilaksanakan setiap tahun secara gratis termasuk tindakan pengobatan. Peserta operasi adalah warga kurang mampu dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang telah mendaftar dan membawa surat rujukan dari puskesmas setempat. Pasien yang ditanganin dalam tahap awal akan dijadwalkan untuk datang kembali dengan mendapatkan bantuan uang saku sebesar Rp. 200.000,00 (merdeka.com/khas/newmont-gratiskan-lagi-operasi-bibir-sumbing.html). program CSR *philanthropy* adalah yang paling diminati oleh masyarakat karena dampak langsung yang

dapat dirasakan. Tidak mengherankan jika program ini mendapat pendanaan paling banyak dibanding program CSR PTNNT lainnya.

Berdasarkan data tahun 2009-2013 jika dikaitkan dengan tulisan Archie B. Carroll dalam bukunya *Business and Society; Ethic and Stakeholder Management* mengenai kategori PMN yang telah melaksanakan CSR, PTNNT telah mengimplementasikan CSR sesuai dengan kategori *philanthropic responsibility*, *philanthropic responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjadi *corporate citizen* yang baik yaitu berpartisipasi dalam mendukung secara finansial dan sumber daya manusia untuk pembangunan masyarakat Sumbawa Barat. Pembangunan masyarakat menjadi tujuan bersama pemerintah Sumbawa Barat dan PTNNT, untuk mencapai tujuan ini perlu ada komitmen dari kedua pihak

Dalam pelaksanaan CSR ada beberapa komitmen prinsip yang dipegang oleh PTNNT sebagai berikut, *sustainability*, *partnership*, teknologi tepat guna, penggalangan dana, *best practice*, dan kontribusi masyarakat. Analisa tentang implementasi CSR dalam mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah dan PMN adalah penggunaan prinsip kemitraan dan *best practice*, kedua prinsip ini mendekati pola *corporate philanthropy* disebutkan oleh Steinbockova (2006) sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut akan dipaparkan sebagai berikut;

a. Partnership

Dalam menjalankan CSR, aktor lain yang turut serta dalam penyelenggaraan CSR mempunyai peran yang sama pentingnya. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan peran dari semua aktor ini dibutuhkan kerjasama yang komprehensif dalam program pengembangan masyarakat. PTNNT menjalankan konsultasi

aktif, kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, LSM, dan organisasi lokal lainnya. Kebijakan Pembangunan Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011-2015. Dalam poin 9 disebutkan tentang Penguatan kemitraan strategis antara dunia pendidikan dengan masyarakat dunia usaha melalui: (1) Peningkatan pemanfaatan dana *corporate social responsibility (CSR)* untuk bidang pendidikan; (2) pengembangan mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas; (3) mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan SDM; (4) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk berperan serta dalam peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Salah satu bentuk kemitraan ini bisa dilihat pada lampiran 1 tentang program beasiswa PTNNT untuk mendukung program pendidikan di Sumbawa Barat.

Sejak diluncurkan kali pertama pada 1998/1999 hingga tahun 2009/2010 jumlah penerima beasiswa PTNNT mencapai 7.650 orang dan bantuan pendidikan 3.242 orang (mataram.antaranews.com). Substansinya sudah mendukung program pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya pendidikan gratis melalui program pendidikan bersubsidi pada seluruh jenjang pendidikan. Program bantuan pendidikan PTNNT pada dasarnya merupakan salah satu upaya PMN untuk membantu peningkatan sumber daya manusia daerah dalam bidang pendidikan khususnya di lingkaran tangbang.

b. Best Practice

Merubah kehidupan sosial masyarakat di suatu daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, PT. NNT berupaya untuk menunjukkan perubahan sosial yang positif. *Best Practice* menjadi salah satu cara mewujudkan perubahan di Sumbawa Barat. Salah satu contoh program yang dapat jadi percontohan adalah Program Agribisnis Beras. Program CSR PT. NNT melaksanakan program ini karena menyadari bahwa pendapatan dari sektor pertambangan bukanlah dalam jangka panjang karena sumber daya alam yang tak terbarukan.

Adanya perusahaan multinasional PT. NNT di Sumbawa Barat pada masa konstruksi membuat perkembangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar tambang. Perkembangan ekonomi kemasyarakatan harus mendukung saat pasca pertambangan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor pertanian. Pertanian merupakan sumber ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pertanian merupakan sumber ekonomi utama masyarakat Sumbawa Barat. Berdasarkan data BPS KSB tahun 2011, luas lahan padi yang masih produktif di Kecamatan Sekongkang mencapai 903 ha. Rata-rata penghasilan pertanian per hektarnya mencapai 3.5 ton.

Permasalahan mendasarkan yang dialami petani adalah kurangnya akses permodalan, pemasaran produk pertanian dan teknologi serta masih kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya hasil pertanian. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi menyebabkan sebagian petani tak dapat berkembang. Posisi tawar produk hasil pertanian yang masih rendah sehingga gabah terpaksa di jual dengan harga di bawah ketentuan pemerintah kepada tengkulak lokal.

Berdasar pada hal ini PT. NNT berupaya untuk memperbaiki perekonomian petani. PTNNT bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat menjadi salah satu solusi perbaikan ekonomi petani di Kecamatan Sekongkang. CSR PT. NNT Melalui yayasan ini, program agribisnis yang berupaya melakukan pengintegrasian dari “hulu ke hilir”. Program-programnya sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan.
2. Penyediaan pupuk yang murah bagi petani.
3. stabilitas harga gabah petani.
4. menciptakan pengelolaan bisnis pertanian

Kesesuaian pembangunan daerah yang diharapkan pemerintah daerah dari implementasi CSR *philantrophy* PTNNT akan menjadi tantangan ketika program yang telah berlangsung tidak berlanjut karena investasi dari PMN tidak lagi ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempersiapkan alternatif pemasukan daerah dan pembangunan daerah dengan meningkatkan sektor-sektor perekonomian unggulan seperti pertanian dan pariwisata yang dipusatkan di daerah Sekongkang, Sumbawa Barat. Peluang dari kemitraan dan *best practice* CSR *philantrophy* PTNNT dan tantangan terhadap adanya aliran CSR PTNNT harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar *opsi* dari PTNNT sewaktu-waktu meninggalkan Sumbawa Barat tidak mempengaruhi pembangunan Sumbawa Barat.

4.4 PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI CSR PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Melaksanakan CSR merupakan salah satu kewajiban dari PTNNT, namun masih kurangnya

pemanafaatannya melalui komitmen kemitraan dan *best practice* yang dibangun pemerintah daerah Sumbawa Barat menjadi tantangan bagi kemajuan sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Sumbawa Barat dan PTNNT terhadap diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 9 yang menginstruksikan pelarangan ekspor bagi perusahaan tambang umum mineral dan batubara berlaku dimulai sejak 12 Januari 2014, yaitu program bantuan pendidikan beasiswa yang mengalami pengurangan pada dari 954 penerima pada tahun 2013 menjadi 558 penerima pada tahun 2014. Namun dampak positif dari *corporate philanthropy* seperti program agribisnis beras tidak terpengaruhi karena adanya program yang bersifat berlanjut dan tak terlalu bergantung akan pendanaan dari PTNNT. Produktivitas tanaman padi merah yang dikembangkan petani Desa Aik Kangkung binaan PTNNT cukup tinggi rata-rata mencapai 8.3 ton per hektare jauh di atas pola biasa dengan produktivitas tertinggi sebanyak Rp 5 ton per ha. (mataram.antaranews, 2013). Prioritas akan program yang berkelanjutan melalui CSR harus lebih difokuskan oleh pemerintah Sumbawa Barat jika sewaktu-waktu investasi pertambangan tidak ada lagi.

Pemerintah Sumbawa Barat masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah, tindakan ini diambil mengingat sarana dan prasarana daerah yang masih tertinggal karena Kabupaten Sumbawa Barat baru berdiri setelah adanya pemekaran daerah dari Kabupaten Sumbawa. Kebijakan pembangunan daerah yang diambil kiranya bisa dimanfaatkan lebih pada peningkatan sumber daya manusia, maka kemajuan akan terlihat dengan sendiri walaupun akan memakan waktu yang cukup lama. PTNNT tetap berfokus pada kemajuan

kemajuan sumber daya manusia agar bisa lebih membuat kemajuan ekonomi jika PTNNT tidak lagi beroperasi di Sumbawa Barat.

Sejak awal berdirinya Kabupaten Sumbawa Barat, PTNNT telah berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan mitra kerja yaitu pemerintah, masyarakat, dan kontraktor lokal. Pada tataran kemajuan ekonomi masyarakat sejak awal PTNNT beroperasi telah membuat banyak perubahan di berbagai sektor. Salah satunya pada kemajuan indeks pembangunan manusia di Sumbawa Barat, peningkatan ini dilakukan dengan membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pelatihan keterampilan. Selain itu, pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu membawa harapan tercapai pendidikan yang lebih tinggi yang bisa didapatkan oleh masyarakat Sumbawa Barat.

Tujuan dari tulisan ini untuk menjadi bahan dalam mengkaji dampak positif CSR. PMN sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) dapat berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di wilayah beroperasinya melalui implementasi CSR. Aggapan ini didukung oleh penelitian Loayza., dkk (2001) yang menyebutkan bahwa PMN telah menguntungkan masyarakat lokal. Melihat persentase total penduduk Sumbawa Barat yang diuntungkan oleh adanya inisiatif CSR oleh PTNNT, hal ini terlihat bahwa CSR mempunyai dampak langsung terhadap pembangunan masyarakat. Contohnya, penduduk yang terkena dampak langsung dari operasi PTNNT ada di 3 dari 8 Kecamatan, yaitu Sekongkang, Jereweh dan Maluk, dengan jumlah penduduk 30.343 jiwa dari total 118.608 jiwa yang bertempat tinggal di Sumbawa Barat. Angka ini menunjukkan bahwa 25 persen penduduk di Sumbawa Barat terkena dampak langsung dari CSR PTNNT. kemudian,

hal yang harus disadari bahwa dampak langsung ini membawa keuntungan bagi perusahaan lokal dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka sebagai hasil dari proyek *capacity-building*, seperti karyawan mendapatkan upah yang lebih tinggi.

CSR PTNNT terlihat juga berdampak pada standar hidup masyarakat disekitar tambang seperti program CSR dalam bantuan masuknya listrik ke desa terpencil, pembangunan sanitasi, pengadaan air bersih dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian banyak petani lokal meningkat pendapatannya sebagai hasil dari Program CSR PTNNT di bidang pertanian. CSR oleh PMN bisa dinggap sebagai peluang dalam membangun suatu daerah, hal ini pun bersifat subjektif karena kebijakan PMN dalam pengimplementasian CSR masih mempunyai kadar kekurangan dan kelebihannya.

Tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Sumbawa Barat untuk pembangunan masyarakat untuk jangka panjang. Hal ini terjadi karena PTNNT melaksanakan pembangunan jangka menengah untuk setiap periode pelaksanaan lima tahun. Pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan adalah yang paling utama dilakukan oleh CSR PTNNT, namun hal ini kurang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumbawa Barat karena prioritas utama yang ingin dibangun oleh pemerintah adalah sektor pertanian, kebijakan ini diambil oleh pemerintah Sumbawa Barat disebabkan mayoritas pekerjaan penduduk Sumbawa Barat ada pada sektor pertanian dan perdagangan. Hal yang ditakutkan jika PTNNT akan memindahkan investasinya ke negara lain akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan akan menurun

disebabkan banyaknya pendanaan yang dilakukan PTNNT untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan di Sumbawa Barat.

Projek *Capacity-building* sepertinya lebih punya dampak yang panjang terhadap pembangunan masyarakat sebagai proyek yang telah dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun aktivitas ekonomi alternatif yang akan digunakan oleh masyarakat diluar aktivitas diluar pertambangan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keunggulan daerah dan untuk membangun industri-industri baru. Program ini tidak mengharapkan adanya perubahan drastis dari masyarakat pada cara mereka menjalankan aktivitas bisnisnya namun lebih menginiasi pada ide-ide bisnis yang baru, hal ini akan lebih baik bagi masyarakat daripada hanya memberi bantuan berupa barang atau dana. Masyarakat yang mengikuti program *capacity-building* akan melanjutkan keuntungan jangka panjang setelah program berakhir dan seharusnya dapat diterapkan kembali pada setiap elemen masyarakat.

Pada akhirnya, pengembangan masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi daerah itu sendiri. Hal ini terlihat bahwa program CSR dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar korporasi beroperasi. Pada kasus CSR PTNNT di Sumbawa Barat, mayoritas masyarakat banyak mencari pekerjaan pada sektor pertambangan. Hasilnya adalah masyarakat secara masif pindah ke daerah sekitar pertambangan dan mencari pekerjaan, hal yang ditakutkan adalah ketika korporasi akan ditutup maka masyarakat harus bisa mencari alternatif pekerjaan selain pertambangan. Kemudian, disamping perbaikan

infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat oleh CSR PTNNT untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Sumbawa Barat. Jika CSR PTNNT berakhir dan korporasi akan ditutup, masyarakat harus siap menerima dan membangun sumber ekonomi yang baru untuk bisa menopang pembangunan daerah. Hal ini mengingat besarnya kontribusi yang telah PTNNT berikan untuk pembangunan daerah Sumbawa Barat.

Perdebatan tentang implementasi CSR PMN dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat masih subjektif karena beberapa faktor yang dapat terjadi, beberapa faktor dapat terjadi diluar kendali korporasi. Kebijakan yang sinergis antara CSR PMN dan kebijakan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mencapai *sustainable development* yang sama-sama diinginkan oleh berbagai pihak untuk terwujud. Pemerintah daerah Sumbawa Barat telah menerapkan peraturan perundang-undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang CSR, berlakunya UU CSR membuat kepastian dan arah yang jelas terhadap pelaksanaan CSR.

Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah setelah program CSR PTNNT ini berakhir. Pemerintah harus dapat mencari sumber pendanaan dan pendukung lain terhadap kemajuan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan akan dapat dicapai jika diarahkan kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat suatu daerah. Jika terlalu banyak pada pembangunan infrastruktur, masalah yang harus dihadapi adalah kemampuan daerah untuk bersaing dari segi sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia yang meningkat adalah hal yang bagus bagi pengembangan masyarakat suatu daerah. Namun, jika hal ini dicapai dengan hanya mengandalkan bantuan dari aktor lain maka

untuk pembangunan jangka panjang akan menjadi masalah. Oleh karena itu, pemerintah daerah Sumbawa Barat secara bertahap harus mempersiapkan alternatif pembangunan yang berfokus lebih banyak pada penguatan sumber daya manusia.

5. Kesimpulan

Pola interaksi hubungan aktor dalam hubungan internasional memunculkan isu-isu baru yang dapat dipelajari. PMN memegang peranan penting dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu PMN yang beroperasi di Indonesia adalah PT. Newmont Nusa Tenggara, tepatnya di wilayah kabupaten Sumbawa Barat. PTNNT menjadi aktor dalam pengembangan masyarakat di Sumbawa Barat. Perubahan peran aktor ini terjadi akibat adanya tekanan dari dunia internasional dan oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tentang pelaksanaan CSR yang selanjutnya diatur melalui peraturan pemerintah daerah Sumbawa Barat Nomor 34 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui CSR untuk menyiapkan masyarakat mengembangkan potensi daerah.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan dari semua *stakeholder*, terutama pemerintah Sumbawa Barat dan PTNNT. pola-pola hubungan kedua aktor ini dapat dilihat melalui pola kerjasama seperti *Cooperation Pattern*, *Interdependence Pattern*, dan *Independence Pattern*. Pola hubungan ini dapat terlihat dalam pelaksanaan CSR oleh PTNNT dalam pembangunan masyarakat di Sumbawa Barat. pelaksanaan CSR melalui program-program seperti *Capacity Building and Empowerment*, *Infrastruktur Development*, *Stakeholder Engagement* dan Hibah ke APBD

pemerintah dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan masyarakat Sumbawa Barat.

Program CSR yang dilaksanakan oleh PTNNT mendukung upaya pemerintah dalam membangun masyarakat. Salah satu indikator dalam melihat pembangunan suatu daerah adalah indeks pembangunan manusia. Pembangunan masyarakat telah menjadi isu yang berkembang yang mendapat perhatian banyak pihak baik itu negara maupun akton non negara. Hal ini menunjukkan bahwa isu pembangunan masyarakat bukan lagi merupakan tanggung jawab negara sebagai pemangku kebijakan melainkan tanggung jawab semua pihak terkait.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kategori daerah tertinggal adalah wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Daerah tertinggal adalah daerah yang masih minim kapasitas infrastruktur pembangunan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu untuk membangun daerah selain infrastruktur, sumber daya manusia juga perlu mendapatkan perhatian. Masalah sosial yang perlu adanya kolaborasi semua pihak (*stakeholder*) sehingga peran pemerintah, swasta dan masyarakat sangat penting. Salah satu perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia adalah PT. Newmont Nusa Tenggara, sehingga berkewajiban untuk melaksanakan program CSR. Terdapat Sejak aktifnya PTNNT di Indonesia pada tahun 2000, peran terhadap pembangunan daerah Sumbawa Barat tidak kecil. salah satu bidang yang menarik perhatian adalah bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan pemberdayaan masyarakat

Sumbawa Barat telah banyak meningkat tiap tahun dapat diketahui melalui indikator indeks pembangunan manusianya.

Berdasarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi *corporate social responsibility* PTNNT di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2009-2013 maka penelitian ini menemukan bahwa pada wilayah PTNNT telah dilaksanakan program CSR 3 Kecamatan yaitu, Jereweh, Maluk, dan Sekongkang. Program-program yang dilaksanakan antara lain, LBI Programme, Beasiswa untuk siswa kurang mampu, bantuan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Dalam melaksanakan program-program tersebut, PTNNT. bekerja sama dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah dan Universitas Mataram.

PTNNT sebagai perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya manusia, sumber daya modal dan teknologi yang tinggi diharapkan dapat memacuh perkembangan masyarakat Sumbawa Barat. Berdasarkan pelaksanaan CSR yang telah dilakukan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan multinasional lain di Indonesia. Dampak positif yang ingin ditingkatkan terhadap pelaksanaan CSR PTNNT akan terus berjalan jika pemerintah dan masyarakat terus berkolaborasi saling bertukar pikiran akan pembangunan masyarakat yang lebih maju. Program-program CSR PT. NNT disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan tidak hanya sebatas bentuk pelaksanaan kewajiban saja tetapi dilaksanakan berdasar nilai-nilai yang menjadi landasan kegiatan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Adisasmita R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Carbaugh, Michael J. (2000). *International Economics*. Edisi Ketujuh. Cincinnati: South-Western College Publishing.
- Carroll, Archie B. (1996). *Business an Society: Ethic and Stakeholder Management*, Edisi Ketiga. Ohio: South-Western College Publishing.
- Cohn, Theodore H. (2012). *Global Political Economy: Theory and Practice*. Edisi Keenam. (United States: Pearson Education).
- Dunning, John H (1992). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Massachusset: Addison Wesley.
- Elias, Juanita dan Peter Sutch (2007). *The Basics International Relations*. (New York: Taylor and Francis e-Library, Routledge).
- Hamann, R. (2003, June). Mining companies' role in sustainable development: the 'why' and 'how' of corporate social responsibility from a business perspective. *Development Southern Africa*, 20 (2), 237-254.
- Hermawan, Yulius P (2006). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, Graha Ilmu).
- Ikbar, Yanuar (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. (Bandung: Refika Aditama).
- Mas'oed, Mohtar (1997). *Perusahaan Multinasional dalam Ekonomi Politik Internasional*. (Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada).
- Oatley, Thomas (2012). *International Political Economy*. Edisi Kelima. New York: Pearson-Longman.
- Tahajuddin U. (2009). *Pola Pengelolaan, Perencanaan dan Pelaksanaan Community Development pada Industri Pertambangan*. (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Jurnal;

- Jenkin, Rhys (2005). *Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty*. <http://www.ecrc.org.eg/Uploads/document>

s/Articles_Globalization,%20CSR%20%26%20poverty.pdf

- Lodge, George C. (2006). *A Corporate Solution to Global Poverty: How Multinationals Can Help the Poor and Invigorate Their Own Legitimacy*. Yale Global Online, Yale Center for the Study of Globalization.
- PPLH Unram (2006). *Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup*. Universitas Mataram.
- Saleh, Gazalba (1991). *Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional: Suatu Tinjauan Hukum Internasional*. (Jakarta: Library Universitas Indonesia).
- Steinbockova, Martina (2007). *Multinational Corporations and Nation-States: Partners, Adversaries or Autonomus Actors?.* Masaryk University: Brno.
- Sambala, Grace L. (2016). *The Role of Multinational Business Corporations to Sustainable Development: The Case of Tanzania Tobacco Processing Ltd*. Norwegian University of Life Sciences.
- Whellams, Melissa. (2007). *The Role of CSR in Development: A Case Study Involving the Mining Industry in South America*. Saint Mary's University: Nova Scotia.

Situs:

- Sumbawa Barat Panen Padi Beras Merah Organik
<https://mataram.antaranews.com/berita/24461/>
- Indeks Pembangunan Manusia Sumbawa Barat*.
<http://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/520>.
- OECD, (2001).
- PT. Newmont Nusa Tenggara Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat
<http://proper.menlh.go.id>
- UNCTAD. (2009) *World Investment Report: Transnational Coprorations, Agricultural Production and Development*.
http://unctad.org/en/Docs/wir2009_en.pdf
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/40/275_bpkp

Laporan:

- Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2013**